

Anggaran Pilkada Karanganyar Disepakati

KARANGANYAR (KR) - Anggaran Pilkada Kabupaten Karanganyar 2024 disepakati Rp 42 miliar. Dari jumlah itu, Bawaslu dijatah Rp7 miliar sedangkan KPU diberi hibah Rp 35 miliar bersumber APBD 2023 dan APBD 2024. Kesepakatan itu ditandatangani Pemda, KPU dan Bawaslu dalam berita acara kesepakatan bersama besaran anggaran kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tahun 2024 di Ruang Garuda Kantor Bupati, Jumat (16/6). Hadir dalam kesempatan itu Sekda Timotius Suryadi, Ketua KPU Triastuti Suryandari, Ketua Bawaslu Nuning Ritwanita Priliastuti serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Kepala Badan Kesbangpol Karanganyar, Bambang Sutarmanto mengatakan nota kesepakatan bersama menjadi dasar pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) dalam menyediakan dana itu di APBD perubahan 2023 dan pembahasan anggaran daerah tahun 2024. Ia berharap keuangan daerah mampu menyediakannya.

Nantinya, penyerahan dana tersebut dituangkan ke nasakh perjanjian hibah daerah (NPHD), agar segera dipakai penyelenggara pemilu memulai tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Karanganyar tahun 2024. Tahapan tersebut akan dimulai jelang akhir tahun ini. "Nanti diberikan 40 persen dulu di tahun ini dengan hibah bersumber APBD perubahan 2023. Sedangkan 60 persen sisanya diberikan tahun depan bersumber APBD 2024," kata Bambang.

Ia mengatakan Pemprov Jateng akan memberikan dana hibahnya ke penyelenggara pemilu terkait kebutuhan Pilgub, dimana pelaksanaan bersamaan Pilkada Karanganyar pada 27 November 2024. Lebih lanjut dikatakan, anggaran pilkada di Karanganyar termasuk tinggi. Sesuai arahan pemerintah pusat, indeks perpemilih membutuhkan biaya Rp 40 ribu-Rp 41 ribu. Sedangkan jika menghitung anggaran pilkada di Karanganyar, perpemilih indeksnya sampai Rp 49.000.

Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti mengatakan pihaknya banyak melakukan penyesuaian anggaran kegiatan di tahapan Pilkada agar dana hibah Rp7 miliar mencukupi. Hibah dari APBD Karanganyar akan dipakai membayar honor panwas desa dan panwas TPS. (Lim)-d

DPRD Karanganyar Soroti Temuan BPK

KARANGANYAR (KR) - Persoalan paket pembangunan gedung milik pemerintah yang belum kelar mendapat sorotan dalam Pandangan Fraksi-fraksi di DPRD Karanganyar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2022, Senin (12/6). Di antaranya, Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS, Sri Hartono memberi sejumlah catatan terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2022.

Catatan itu di antaranya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan pengerjaan enam paket gedung dan bangunan yang tidak sesuai kontrak. Nilai temuan atas pengerjaan itu mencapai Rp 397 juta. Kemudian FPKS menyoroti denda keterlambatan proyek pembangunan yang sampai saat ini belum disetorkan ke kas daerah, dengan nilai Rp 198 juta.

Sekretaris FPKS sekaligus Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Darwanto menyebut temuan BPK di antaranya proyek pembangunan Gedung Kebudayaan, Gedung Rumah Dinas (Rumdin) Bupati tahap 2, dan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah. Dalam temuannya, BPK memberi catatan ada kekurangan volume pengerjaan pada proyek-proyek tersebut. Nilai kekurangan volume pengerjaannya bervariasi dari di bawah Rp 10 juta hingga di atas Rp 125 juta.

Selain temuan BPK, FPKS juga menyoroti penempatan aset kas daerah senilai Rp 132 miliar dalam bentuk giro, bukan deposito di Bank Jateng. Kemudian juga menyoroti tingginya Silpa 2022 yang nilainya Rp 180 miliar. "Banyak kegiatan yang tidak terlaksana di 2022 sehingga menjasi silpa dan nilainya cukup tinggi," ungkap Darwanto.

Jubir FPDIP, Sartono juga menyampaikan persoalan Silpa senilai Rp 180 miliar. Menurutnya, tingginya Silpa ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah kurang cermat dalam perencanaan. Dia minta Pemkab bisa menekan angka Silpa kurang dari 5 persen. (Lim)-d

Karanganyar Gelar 'Jebol Dompot'

KARANGANYAR (KR) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karanganyar telah melaksanakan program jemput bola untuk kalangan disabilitas, orang dengan gejala jiwa (ODGJ), lansia, pemilih pemula Pemilu 2024, dan rentan (Jebol Dompot). Kegiatan ini telah merekam data kependudukan ribuan warga dari kalangan tersebut.

Kepala Disdukcapil Karanganyar, Junaedi Purwanto mengatakan, para petugas menjadwalkan perekaman di lokasi sasaran, menggunakan dua unit mobil dinas yang diandalkan jemput bola sasaran khusus tersebut. Untuk merekam data kalangan pemilih pemula, petugas lapangan menyasar SMA dan SMK negeri maupun swasta di Karanganyar.

"Pada tahun 2022, sudah ada sekitar 9.000 data direkam dari kalangan pemula. Yakni usia 16 tahun yang pada 2023 berusia 17 tahun. Tahun ini juga merekam sasaran yang sama, yakni mereka yang akan berusia 17 tahun saat Pemilu 2024," jelas Junaedi, Rabu (14/6). Ia menyebutkan, kepemilikan KTP merupakan hak WNI yang sudah genap usia 17 tahun, karena KTP juga melandasi semua keperluan yang membutuhkan dokumen kependudukan.

Menurut Junaedi, para petugas lapangan Disdukcapil juga merekam data kependudukan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta disabilitas di rumah mereka. Perekaman data ini meliputi perekaman iris mata dan sidik jari. "Ada 1.695 orang bergangguan jiwa hasil pendataan Dinas Kesehatan. Data itu disodorkan ke kami agar ditindaklanjuti dengan perekaman data kependudukan, sebab mereka tidak memungkinkan datang sendiri mengurus KTP," ungkapnya. (Lim)-d



KR-Abdul Alim

Perekaman data secara jemput bola dan program Jebol Dompot di Karanganyar.



KR-Chandra AN

AROFAH, penjual kacamata di Kios Optik Pasar Johar Utara Semarang memeriksa kondisi optis mata seseorang yang hendak membeli kacamata di kiosnya. Menurutnya banyak keluhan pandangan mata konsumen yang diakibatkan radiasi pancaran layar handphone dan komputer. Mereka tak sadar pancaran cahaya layar yang bila dipandang terlalu dekat dan terus-menerus bisa mempengaruhi mata. Selain mata sering pedih dan berair, juga bergeser optisnya. Pandangan jadi kabur dan silindris. Karenanya, menurut Arofaah permintaan kacamata antiradiasi kini meningkat.

Bawaslu Banyumas Imbau Semua Pihak Menahan Diri

BANYUMAS (KR) - Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, mengimbau semua pihak untuk menahan diri, khususnya terkait pencalonan presiden. Masing-masing pihak diminta tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Banyumas, Yon Daryono mengatakan, saat ini tahapan Pemilu 2024 memang sudah dimulai dan sedang berlangsung tahapan pemutakhiran data pemilih, pendaftaran bacaleg (bakal calon anggota legislatif), dan verifikasi administrasi dan masa perbaikan persyaratan bacaleg,

"Tahapan pendaftaran maupun penetapan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presi-

den (cawapres) yang merupakan ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dimulai. Namun kenyataan di lapangan, saat ini sejumlah nama capres maupun cawapres sudah dimunculkan oleh sejumlah partai politik (parpol) maupun koalisi parpol. "Bawaslu saat ini masih melaksanakan fungsi pemantauan, pengawasan, dan sebagainya. "Hanya subjek hukumnya belum sampai masuk dalam konteks norma. Subjek hukumnya, penetapan pasangan capres-cawapres nanti juga di

ranah KPU dan sampai sekarang belum ada pasangan capres-cawapres," jelas Yon Daryono.

Berkaitan dengan adanya pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang mengajak masyarakat mendukung capres Ganjar Pranowo, saat kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, Minggu (11/6), Yon mengatakan pihaknya belum bisa melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran seperti netralitas dan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan capres-cawapres tersebut.

Menurutnya, hal itu disebabkan apa yang disampaikan Bupati Banyumas belum masuk ke dalam subjek hukumnya. "Itu tidak masuk subjek hukum karena memang belum ada pasangan

calon presiden. Belum ada," tegas Yon Daryono. Ia menilai pernyataan atau ajakan itu disampaikan oleh Bupati Banyumas pada hari Minggu atau di luar jam kerja. "Kami mengharapkan, karena saat ini sudah masa-masa tahapan pemilu, semua pihak harus menahan diri," tambah Yon.

Ia mengajak semua pihak menunggu, karena akan ada Peraturan KPU terkait penetapan pasangan calon dan regulasi yang mengakomodasi ruang untuk melakukan kampanye secara sah, resmi, dan terjadwal dalam tahapan Pemilu 2024. Nantinya masing-masing pihak juga tidak aakan saling melaporkan, asal semua sesuai dengan norma atau undang-undang dan peraturan yang terkait Pemilu 2024," tandas Yon. (Dri)-d

Diterima PPPK dan Perdes, Panwascam Undurkan Diri



KR - Jarot Sarwosambodo

Pelantikan Panwascam Bruno di Kantor Bawaslu Purworejo.

PURWOREJO (KR) - Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Bruno dan Banyuwirip mengundurkan diri karena diterima sebagai guru PPPK serta perangkat desa (perdes). Bawaslu Kabupaten Purworejo memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) kedua pengawas itu dan melaksanakan pelantikan secara terpisah.

Koordinator Divisi Organisasi, SDM, Pendidikan, dan Pelatihan Abdul Aziz mengatakan, anggota Pan-

wascam Banyuwirip sudah diganti dan dilantik lebih dahulu. "Dwi Waluyo sebagai Panwascam Banyuwirip sudah dilantik lebih dahulu, sedangkan Saefur Rohman juga dilantik sebagai Panwascam Bruno pada Rabu 14 Juni 2023," ujarnya kepada KR, Jumat (16/6).

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq, dilanjut dengan penandatanganan berita acara sumpah janji dan pembacaan pakta integritas. Kedua panwascam

itu sudah menjalankan tugasnya melaksanakan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam tahapan Pemilu 2024.

Selain itu, PAW juga dilakukan terhadap empat Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang mengundurkan diri. PKD yang diganti ada di Desa Karangasari Kecamatan Purwodadi, Bojong Ngombol, Pakisrejo Banyuwirip, dan Kedung Pomahan Kulon Kemiri. Empat PKD itu mengundurkan diri karena berbagai alasan antara lain diterima bekerja di luar daerah dan dilantik sebagai panwascam. Para PKD itu dilantik oleh ketua panwascam di masing-masing kecamatan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nur Kholiq meminta agar melakukan percepatan penyesuaian kinerja pengawasan. Panwascam harus segera melakukan koordinasi dengan stakeholders di tingkat kecamatan. (Jas)-d

Wonogiri Bakal 'Kehilangan' 654 ASN

WONOGIRI (KR) - Sebanyak 654 aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Wonogiri bakal purnatugas atau pensiun. Untuk menggantikan tugas mereka, Bupati Joko Sutopo menyatakan bertekad meningkatkan kemampuan kalangan ASN di daerahnya di bidang IT.

"Karena belum ada pengangkatan calon pegawai baru, maka upaya kami meningkatkan kemampuan kalangan ASN agar lebih menguasai teknologi informasi. Ke depan, pelayanan kepada masyarakat juga berbasis online," ungkap bupati saat ditemui wartawan usai memberikan penghargaan kepada ASN yang akan pensiun, Rabu (14/6) di pendapa Rumdin Bupati Wonogiri.

Diakui bupati, dari 654 ASN yang pensiun antara Juni 2023 hingga Juli mendatang, beberapa di antaranya adalah pejabat teras Pemkab Wonogiri. "Bahkan Pak Sekda (Sekda Wonogiri Drs Haryono MM), staf ahli bupati, sebentar lagi juga segera memasuki masa pensiun," jelasnya. Dengan demikian, lanjut Joko Sutopo, agar pelayanan kepada masyarakat dengan purnanya 654 ASN tidak terganggu, kami akan meningkatkan kemampuan pegawai birokrasi di bidang IT. "Misalnya pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh sepuluh orang pegawai, nantinya cukup seorang ASN," tandasnya.

Saat memberikan pengarahan, orang nomor satu di Wonogiri ini menyatakan ASN telah menunjukkan pengabdian dan kontribusi yang besar terhadap Pemkab. Buktinya, beberapa kali ini Pemkab Wonogiri meraih penghargaan atas prestasi pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun nasional. Bupati Joko mengajak 654 ASN yang segera purnatugas tetap mendukung program *Go Nyauwiji Sesarengan Bangun Wonogiri* dari luar pemerintahan. (Dsh)-d

Doa Lintas Agama Jelang HUT ke-77 Bhayangkara

MAGELANG (KR) - Doa lintas agama digelar Polresta Magelang dan Polres Magelang Kota dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-77 Tahun 2023, Kamis (15/6). Kegiatan di Polresta Magelang dilaksanakan di aula Polresta Magelang dan dihadiri Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP maupun lainnya, sedang kegiatan di Polres Magelang Kota dilaksanakan di aula Polresta Magelang Kota dihadiri Wakil Walikota Magelang Drs HM Mansyur Mag.

Bupati Magelang di forum doa lintas agama, yang dilaksanakan di aula Polresta Magelang, di antaranya menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-77 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polresta Magelang. "Terima kasih atas komitmen dan peran serta Polri

dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kondusivitas di Kabupaten Magelang. Semoga ke depan, Polri semakin solid dengan seluruh stakeholder dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Bupati Magelang.

Sesuai dengan tema peringatan Hari Bhayangkara ke-77 "Polri Presisi Untuk Negeri Menuju Indonesia Maju" Bupati Magelang menilai ada makna mendalam, disamping Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga kondusivitas masyarakat, Polri juga ingin lebih dekat dengan seluruh stakeholder seperti TNI, tokoh agama dan masyarakat, karena kedekatan merupakan kekuatan sejati menjadi modal menuju Indonesia maju.

Melalui momentum doa lintas agama ini, Bupati Magelang juga mengajak semua untuk senantiasa

bersama setia membangun optimis, dengan bersinergi berkolaborasi, bergotongroyong yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 untuk menggapai Indonesia Emas.

Bupati Magelang juga mengajak semua untuk berikhtiar batin dengan menundukkan kepala, merendahkan jiwa, bersama-sama memohon ampun dari segala salah dan dosa, mengetuk pintu langit agar ke depan Kabupaten Magelang bisa menjadi lebih baik demi mewujudkan masyarakat yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah.

Kapolresta Magelang di antaranya mengatakan kegiatan doa lintas agama ini dilaksanakan di antaranya untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Magelang ini tetap dalam kondisi aman, damai dan kondusif.

Diharapkan doa yang dipanjatkan tidak hanya untuk Kepolisian semata, namun juga untuk wilayah Kabupaten Magelang di bawah kepemimpinan Bupati Magelang diberikan kelancaran, kesuksesan, serta ini menginjak tahun politik, ke depan kami bersama TNI dan seluruh stakeholder yang ada diberikan kemudahan untuk mengawal pesta demokrasi.



KR-Thoha

Doa Lintas Agama berlangsung di aula Polresta Magelang.